DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Oemi, *Dasar-dasar Public Relations*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1993.

Effendy, Onong Uchjana, *Human Relations dan Public Relations dalam management*, Alumni, Bandung, 1979.

Pemda, *uraian tugas jabatan struktural dan non struktural pada biro humas*, Setwilda Tingkat I Jawa Barat, 1995.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS SETWILDA TK. I JAWA BARAT

KEPALA BIRO HUMAS
H. HADYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

Kabag Pengumpulan dan Penyaranganinformasi
Drs. Nenny. K
Penata TK. I
NIP. 480 084 362

- **Kasubag Pendataan**
  Drs. Septhony Safan
  Penata Muda TK. I
  NIP. 010 206 406
  1. Eman Rusmana
     Penata Muda III/A
     NIP. 480 026 223
  2. Eule Kurniasih
     Penata Muda III/A
     NIP. 480 053 526
  3. D. Wianawati
     Penata Muda III/A
     NIP. 480 040 805
  4. R. Dodo Sofyan
     Pengatur TK. I III/d
     NIP. 480 084 826
  5. Djudju Darsana
     Juru TK. I I/c
     NIP. 480 085 362
- **Kasubag T.U Biro**
  Nandang Syarif H, SH
  Penata TK. I
  NIP. 480 091 987
  1. R. Gunawan
     Penata TK. I
     NIP. 480 094 462
  2. H. Dolmi Ibrohim
     Pengantur TK. I III/d
     NIP. 480 081 840
  3. Nanang Suryana
     Pengatur TK. I IID
     NIP. 480 090 805
  4. Dedi Suhendi
     Pengatur Muda TK. I II/b
     NIP. 480 094 826
  5. Tata
     Pengatur Muda TK. I II/b
     NIP. 480 094 816
  6. Muniman
     Pengatur Muda II/a
     NIP. 480 042 676

Kabag Penerangan Pub. Isasi dan Dokumentasi
Drs. Koe Danggunang

- **Kasubag Penyajian**
  Suryana Tjiptamiharja H
  Penata
  NIP. 480 070 046
  1. Kartika
     Pengatur II/c
     NIP. 480 090 028
- **Kasubag Penerbitan**
  Drs. Chandra M
  Penata Muda TK. I
  NIP. 480 109 154
  1. Kuswara
     Pengatur II/c
     NIP. 480 094 017
- **Kasubag Dokumentasi dan Distribusi**
  Drs. Damus
  1. Rusniyat
     Penata Muda III/A
     NIP. 480 043 421
  2. Drs. Sukiman
     Penata Muda III/A
     NIP. 480 091 726
- **Kasubag Audio Visual**
  Drs. Endang. K
  Penata II/c
  NIP. 480 093 186
  1. Taufik
     Pengatur Muda TK. II/b
     NIP. 480 094 020

Kabag Penerbitan
Drs. Subekti
Penata Tingkat I
NIP. 130 702 508

- **Kasubag Penyajian Berita**
  Drs. Yoyo. P
  Penata III/c
  NIP. 480 075 084
  1. Husayin AB
     Penata III/c
     NIP. 480 075 084
  2. Raasid C. Iskandar
     Penata Muda III/A
     NIP. 480 088 150
  3. Achmad Syafei
     Pengatur TK. I IID
     NIP. 480 092 460
  4. Asep Saefurohman
     Pengatur TK. I IIc
     NIP. 480 089 838
  5. Sam Syarifudin
     Pengatur TK. I II/d, I II/b
     NIP. 048 184 759
  6. Tayat Andiat
     Pengatur II/c
     NIP. 048 092 079
  7. Nurdin
     Pengatur II/c
     NIP. 486 080 143
- **Kasubag Bina Media Massa**
  Bambang. M., SH
  Penata III/c
  NIP. 480 091 612
  1. Y. Yoga Pranata
     Penata TK. I III/D
     NIP. 480 091 612
  2. Anna Suzana Dhana
     Pengantur TK. I IIIc
     NIP. 480 092 074
  3. Dadang Ruskandar
     Pengatur TK. I II/d
     NIP. 480 092 292
  4. Hasanudin
     Pengatur Muda TK. I
     NIP. 480 092 890

KARTU DISPOSISI

INDEX : ..... TANGGAL PENYELESAIAN

....

D A R I : .....

PERIHAL : .....

TGL. SURAT : .....

NO. SURAT : .....

INSTRUKSI / INFORMASI *)	DITERUSKAN KEPADA :

*) Coret yang tidak perlu

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
Jl. Diponegoro No. 22 Telepon : 432448 - 433347 - 430993
B A N D U N G
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

G U N T I N G A N B E R I T A
Nomor :

H A R I A N / M I N G G U A N / M A J A L A H	:	ANGKATAN BERSENJATA
H A R I / T A N G G A L / T A H U N	:	SENIN / 13 JULI 1998
H A L A M A N / K O L O M / T A H U N	:	VI / 3,4,5 / XXXII
B E R I T A	:	D A E R A H
C A T A T A N	:	

Jangan ada pungli proyek ajudikasi tanah

Bandung, (AB).-

Walikota Bandung Wahyu Hamijaya menegaskan pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui proyek ajudikasi di Kotamadya Bandung, jangan sampai ada keluhan-keluhan dari masyarakat terutama mengenai pungutan-pungutan di luar ketentuan yang berlaku.

"Ini akan menodai pelaksanaan kerja keras dari Tim Ajudikasi, tapi juga citra pemerintahan di mata masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah sedang berupaya untuk melaksanakan reformasi secara menyeluruh utamanya yang menyangkut kolusi, korupsi dan nepotisme", kata Walikota ketika melantik Tim Ajudikasi Kodya Bandung tahun 1998/1999 di Bandung Kamis (9/7).

Tiga bantuan

Ia mengatakan pelantikan tersebut untuk ketiga kalinya dilaksanakan di wilayah Kodya Bandung. Hal itu berarti secara berturut-turut sejak tahun anggaran 1996/1997 sampai tahun anggaran 1998/1999. Dengan demikian masyarakat Kodya Bandung mendapat bantuan melalui APBN dari pemerintah Pusat, Loan dari Bank Dunia dan hibah dari Pemerintah Australia hanya untuk mensertifikatan tanah-tanah rakyat secara massal melalui proyek Ajudikasi.

Walikota juga mengatakan program tersebut merupakan langkah pro aktif dari pihak pemerintah Lamamnya dan Badan Pertanah.. Nasional (BPN) khususnya untuk secara langsung mengadakan pendaftaran tanda menunggu permintaan dari pemerintah hingga menguntungkan semua lapisan masyarakat untuk membuat sertifikat tanah mereka.

Baru 31,23%

Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bandung Drs. Imroni Anwar Bee mengatakan luas kota Bandung yang mencapai 16.739 hektare baru disertifikatkan 5.200 hektare. Tetapi jikalau dilihat dari jumlah persil mencapai 412.000 persil dan telah diterbitkan sertifikatnya mencapai 223.410 buah atau 54,4%.

Ia menyebutkan pada tahun anggaran 1996/1997 dari target sebanyak 67.000 buah sertifikat dari target 65.000 buah sertifikat.

Dan untuk tahun 1998/1999 ditargetkan sebanyak 35.000 buah yang dipusatkan di sembilan kecamatan di 19 kelurahan se Kodya Bandung.

Imroni mengatakan pula biaya pembuatan sertifikat melalui proyek ajudikasi yaitu tanah adat sekitar Rp 13.000,- dan tanah negara seharga Rp 27.000.-

Miskin 25 persen

Walikota Bandung Wahyu Hamijaya menegaskan dalam suasana reformasi saat ini, aparat jangan berdiam diri tetapi harus aktif dan kreatif membudayakan masyarakat untuk mendoreng dan menciptakan kesejahteraan masyarakat apalagi dalam situasi yang serba sulit dalam menghadapi krisis ekonomi dan menurunnya dana pembangunan.

Hal tersebut disampaikan walikota pada pengarahan kepada para Kepala Dinas, Kepala Bagian dan instansi vertikal di dalam lingkungan Pemda Kodya Bandung Dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) tahun 1998/1999 di Bandung.

Walikota mengatakan masalah yang sangat mendasar dalam penyusunan Rakorbang yaitu konsep pola dasar Pelita VIII belum selesai. Krisis ekonomi dan menurunnya adna pembangunan. Dampak krisis ekonomi terhadap terjainya PHK dan adanya perusahaan yang gulung tikar, tingkat kemiskinan di Kodya Bandung menjadi 25%. Laju pertumbuhan ekonomi Kodya Bandung menjadi lima persen, tuntutan reformasi yang masih perlu ditingkatkan dan tuntutan penyediaan sembako bagi masyarakat yang tersedia.

Tuntutan reformasi

Ia mengatakan masalah yang cukup kompleks tersebut, meminta kepada segenap aparat melalui Rakorbang agar semua dinas bagian dan kepala Kantor, serta intansi yang terkait lainnya yang ada di Kodya Bandung mampu menyamakan missi, persepsi terhadap rencna situasi dan kondis pembangunan tahun 1998/1999 yang disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi serta tuntutan reformasi di segala bidang.

Menurut Walikota Wahyu Hamijaya, dalam kondisi dan situasi yang serba sulit saat ini, agar rencana pembangunan lebih tertumpu pada pemberdayaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Konsep kebijakan Pemda Kodya Bandung di dalam memberdayakan masyarakat tersebut diantaranya melalui program pembangunan Satata Sarikса pengguliran dana usaha bagi golongan ekonomi lemah dan lima pilar pemberdayaan masyarakat Jawa Barat.

Ajak ormas

Di bagian lain Walikota Bandung Wahyu meminta pada segenap aparat agar memanfatkan potensi organisasi kemasyarakatan yang ada di Kodya Bandung, untuk dilibatkan fungsi dan peranannya, kemadiran ormas-ormas tersebut sangat dirasakan manfaatnya untuk ikut aktif.

Karena itu walikota mengajak kepada jajaran ormas yang ada di Bandung untuk ambil bagian di dalam menyikapi persoalan, terutama keterlibatan dan kebersamaan dalam melaksanakan program-program Pemda Kodya Bandung sesuai dengan semangat yang menuntut adanya perubahan di segala bidang terutama sekali dalam malaksanakan pembangunan menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera.

(4.35/3.6)

DIHATURKAN DENGAN HORMAT KEPADA :

1. YTH. BAPAK GUBERNUR KDH TK.I JAWA BARAT
2. YTH. BAPAK WAKIL GUBERNUR BID. PEMKESRA
3. YTH. BAPAK WAKIL GUBERNUR BID. EKBANG
4. YTH. BAPAK SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

KEPALA BIRO HUBUNGAN ...

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010065 344

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
Jl. Diponegoro No. 22 Telepon : 432448 - 433347 - 430993
B A N D U N G

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

G U N T I N G A N B E R I T A
Nomor :

H A R I A N / M I N G G U A N / M A J A L A H : PIKIRAN RAKYAT
H A R I / T A N G G A L / T A H U N : MINGGU, 12 JULI 1998
H A L A M A N / K O L O M / T A H U N : II / 6.7.8 / XXXII
B E R I T A : D A E R A H
C A T A T A N :

Wahyu Widodo, Aa Tarmana, Husein J. dan Dana Setia

Empat Balon Dinilai Figur Paling Layak

BANDUNG, (PR).-

Empat organisasi karya pemuda (OKP) secara resmi menyatakan agar DPRD Kodya Bandung tidak memilih H. Wahyu Hamijaya untuk menjadi Walikota Bandung periode 1998-2003. Keempat OKP tersebut adalah GM FKPPI, PPM, GM Kosgoro dan Baladhika Karya.

Hal ini terungkap setelah keempat OKP tersebut berkumpul dengan perwakilan para pemuda dari berbagai organisasi untuk saling memberikan informasi tentang pemilihan Walikota Bandung, Sabtu (11/7) kemarin.

Lembaga lain yang turut hadir pada acara itu antara lain, IKA GMNI, Mapancas, MPTI, Keluarga Pemuda Pemudi Gerlong dan Alumni Ikatan Pemuda Kompleks Pusat Infantri dan Keluarga Pemuda asal NTB Bandung. Namun karena belum mendapatkan mandat organisasi, persetujuan mereka terhadap AHW (Asal Bukan Wahyu Hamijaya) sifatnya hanya perseorangan.

Seluruh OKP yang hadir sepakat, Walikota mendatang haruslah seseorang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap rakyat, terutama terhadap warga Bandung, memiliki visi jauh ke depan, berjiwa reformasi, dan tidak mempermasalahkan apakah Walikota nantidatang dari kalangan sipil atau ABRI.

"Kita tidak ingin terjebak dalam dikotomi sipil-militer. Orang yang terbaiklah yang harus didukung jadi Walikota, demi menciptakan Kota Bandung yang lebih baik," ujar Asep dari Baladhika.

Sementara itu, GM Kosgoro melalui ketuanya, Endang, menyebutkan dua nama yang layak untuk memimpin Bandung, yakni Kolonel Inf. Aa Tarmana dan Drs. Dana Setia. GM FKPPI dan PPM mengusulkan dua nama, yakni Kolonel Aa Tarmana dan Kolonel Wahyu Widodo (mantan Aster Kasdam Siliwangi). Sedangkan nama Husein Jachjasaputra dilontarkan juga dalam pertemuan itu.

Meskipun ada beberapa nama disebut-sebut, menurut mereka, ini hanya sebagai masukan yang juga atas dasar informasi yang dihimpun dari berbagai kalangan. Tapi, tetap bahwa bakal calon dari ABRI itu kita serahkan kepada Pangdam III/Siliwangi dan calon dari sipil kita serahkan kepada birokrat. Namun diharapkan, pihak ABRI maupun sipil menyodorkan bakal calon yang berkualitas dan memiliki kepedulian tinggi kepada rakyat. Selain itu pula, harus memiliki intelektualitas dalam membangun Kota Bandung.

Menurut Ketua GM Kosgoro, sudah waktunya rakyat diberi prioritas utama untuk menentukan siapa Walikota yang pantas untuk memimpin Bandung. "Kita menolak segala bentuk rekayasa atau calon Walikota yang mementingkan pribadi dan golongannya serta anti reformasi," tandasnya.

Hal senada juga dikemukakan Endang, bahwasanya, Walikota harus menjadi agen reformasi yang visioner. Karena itu, ia meminta agar Dewan secara cermat meneliti latar belakang kehidupan semua calon.

Jubir Baladhika memberikan informasi yang cukup mengagetkan, yakni keberadaan oknum anggota Dewan yang berpikir materialistis dalam urusan pemilihan Walikota ini. "Saya pernah mendengar ada anggota Dewan yang menyebutkan, *aing mah nu penting kaharti we, jeung jelas itung-itungannana. Da jadi anggota ge ngan sataun deui.* Ini jelas satu pernyataan yang membahayakan keinginan warga Bandung untuk mendapatkan Walikota yang manipuni," jelasnya.

Atas dasar itu, para OKP dan pemuda berniat untuk memberikan salinan hasil putusan pertemuan kemarin kepada DPRD Kodya Bandung, sebagai satu bahan yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan.***

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

DIHATURKAN DENGAN HORMAT KEPADA :

1. YTH. BAPAK GUBERNUR KDH TK.I JAWA BARAT
2. YTH. BAPAK WAKIL GUBERNUR BID. PEMKESRA
3. YTH. BAPAK WAKIL GUBERNUR BID. EKBANG
4. YTH. BAPAK SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH